

## **Aktualisasi Pembentukan Kebijakan di Bidang Keuangan Berbasis Kecerdasan Buatan**

M. Aris Munandar, Wiranti, Aditya Dwi Rohman

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

m.arismunandar@unhas.ac.id, wiranti8315@gmail.com, adityadwirohman007@gmail.com

### **ABSTRAK**

Artikel ini membahas tentang aktualisasi pembentukan kebijakan di bidang keuangan berbasis kecerdasan buatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang dituangkan secara holistik, sistematis, dan objektif. Penerapan kebijakan yang berbasis pada Artificial Intelligence pada sektor keuangan di Indonesia memiliki manfaat yang sangat besar dan sangat relevan untuk diterapkan. Dengan dibentuknya kebijakan yang berbasis Artificial Intelligence, hal tersebut dapat memberikan analisis data yang lebih baik dan lebih akurat serta dapat meningkatkan efisiensi di bidang keuangan.

**Kata Kunci : Pembentukan Kebijakan, Keuangan, Kecerdasan Buatan**

### **ABSTRACT**

*This article discusses the actualization of policy formation in the finance sector based on artificial intelligence. The research method used in this study is normative juridical. In terms of its purpose, this research is descriptive-analytical. The types of data used are primary and secondary data. The data collection methods include literature studies and analysis of relevant legislation, which are analyzed qualitatively to obtain conclusions presented holistically, systematically, and objectively. The implementation of policies based on artificial intelligence in the financial sector in Indonesia has significant benefits and is highly relevant to apply. The formation of AI-based policies can provide better and more accurate data analysis and increase efficiency in the financial sector.*

**Keywords: Policy Formation, Finance, Artificial Intelligence**

## A. Pendahuluan

Stabilitas sistem keuangan merupakan bagian penting dalam sistem perekonomian suatu negara. Sistem keuangan yang tidak stabil dan tidak efektif sangat rentan terhadap berbagai persoalan sehingga dapat mengganggu perputaran perekonomian yang berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.<sup>1</sup> Salah satu poin penting dari amanat UUD NRI 1945 bahwa perekonomian nasional harus diselenggarakan dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.<sup>2</sup> Oleh karena itu, untuk menjaga stabilitas sistem keuangan diperlukan kebijakan yang tepat dengan memanfaatkan kemajuan teknologi.

Di era kemajuan teknologi yang sangat pesat menuntut berbagai bidang untuk mampu menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang diberlakukan termasuk menuntut untuk lebih memanfaatkan teknologi secara efektif dan efisien. Salah satu hal yang erat kaitannya dengan teknologi adalah *Artificial Intelligence (AI)*.

Menurut H. A Simon *Artificial Intelligence (AI)* merupakan suatu pelajaran agar komputer melakukan hal yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh manusia. Sedangkan Knight dan Rich memberikan definisi bahwa *Artificial Intelligence (AI)* merupakan suatu bagian dari *computer science* yang memahami tentang upaya dalam menciptakan komputer sebagaimana apa yang dapat dilakukan oleh manusia bahkan lebih baik dari itu. Adapun Norvig dan Russel mengategorikan *Artificial Intelligence (AI)* sebagai dua dimensi utama yaitu berfikir dan bertindak<sup>3</sup>. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa *Artificial Intelligence (AI)* merupakan suatu sistem yang dirancang untuk melakukan berbagai tugas dengan meniru kecerdasan manusia.

*Artificial Intelligence (AI)* sebagai suatu sistem yang menggunakan algoritma *machine learning* dapat menganalisis data dengan cepat dan akurat serta menghasilkan informasi penting yang dapat membantu dalam pengambilan kebijakan.<sup>4</sup> Pemanfaatan *Artificial*

---

<sup>1</sup> Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Efektivitas Layanan Keuangan Berbasis Machine Learning Sebagai Komponen Pendukung Kebijakan Makroprudensial Pascapandemi Covid-19”, Jurnal Ukrim, hlm. 256.

<sup>2</sup> Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Inondoesia Tahun 1945.

<sup>3</sup> Jamaaluddin dan Indah Sulistyowati, 2021, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Sidoarjo: Umsida Press, hlm. 4-5.

<sup>4</sup> Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, “Bagaimana AI dapat Membantu dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Lebih Baik”, Lampung: Universitas Teknokrat Indonesia, <https://ftik.teknokrat.ac.id/bagaimana-ai-dapat-membantu-dalam-pengambilan-keputusan-bisnis-yang-lebih-baik/>, diakses Sabtu, 25 Mei 2024.

*Intelligence (AI)* dalam pembentukan kebijakan merupakan inovasi layanan keuangan yang memiliki pengaruh positif dan merupakan alternatif yang dapat memberikan kualitas layanan keuangan yang lebih efektif dan efisien.

Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* di bidang keuangan sangat diperlukan karena kebijakan dalam bidang keuangan memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian suatu negara dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu contoh pengambilan kebijakan yang dapat diterapkan dengan *Artificial Intelligence (AI)* adalah penilaian kredit. Dengan menggunakan teknologi *Artificial Intelligence (AI)* lembaga keuangan dapat mengembangkan model penilaian kredit yang lebih akurat berdasarkan data historis dan perilaku konsumen, sehingga memungkinkan pengambilan kebijakan yang lebih baik dalam pemberian pinjaman.

Beberapa kekurangan yang akan terjadi di bidang keuangan tanpa menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* adalah *Pertama*, pemrosesan data yang dilakukan secara manual dapat memakan waktu yang lama dan rentan terjadi kesalahan sehingga menghasilkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan risiko kesalahan. *Kedua*, tanpa menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* analisis cenderung terbatas karena analisis dengan cara manual tidak mampu mengidentifikasi pola-pola kompleks atau tren yang tersembunyi dalam data besar dan beragam sehingga dapat menghambat kemampuan lembaga keuangan untuk membuat keputusan yang tepat waktu dan akurat. *Ketiga*, penilaian kredit dengan cara manual kurang efisien. Keempat, tanpa menggunakan *Artificial Intelligence (AI)* lembaga keuangan akan kesulitan dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko secara efektif. Kelima, keterbatasan inovasi produk dan layanan tanpa *Artificial Intelligence (AI)* menyebabkan lembaga keuangan sulit dalam mengembangkan produk dan layanan baru yang inovatif sesuai kebutuhan konsumen sehingga menyebabkan kehilangan daya saing dan peluang pertumbuhan di pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, integrasi teknologi *Artificial Intelligence (AI)* menjadi semakin penting untuk meningkatkan kinerja dan daya saing lembaga keuangan di era digital.

Berdasarkan uraian tersebut, pada dasarnya *Artificial Intelligence (AI)* dapat menjadi sebuah solusi dalam pembentukan kebijakan di bidang keuangan. Sehingga tulisan ini akan membahas tentang hal yang menjadi prospek penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembentukan kebijakan keuangan di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Dari segi tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan meliputi studi kepustakaan serta analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang dianalisis secara kualitatif sehingga memperoleh kesimpulan yang dituangkan secara holistik, sistematis, dan objektif.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kecerdasan Buatan dalam Proses Pembentukan Kebijakan**

Sektor publik memegang peranan yang sangat besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Namun, tantangan termasuk konsentrasi kerja, sistem yang ketinggalan zaman, dan tenaga kerja yang sedikit sering mengakibatkan terhambatnya tata kelola dan efisiensi. Strategi yang sangat tepat pada sektor publik adalah dengan melakukan modernisasi yaitu dengan mengadopsi *Artificial Intelligence (AI)* sebagai sebuah strategi. Dengan demikian manfaat yang dapat diperoleh pada sektor publik yaitu dapat memodernisasi manajemen informasi, memperbaiki komunikasi, menjamin keamanan, dan menambah efisiensi.<sup>5</sup>

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, *Artificial Intelligence (AI)* semakin banyak digunakan di sektor publik termasuk salah satunya kementerian keuangan. Kementerian keuangan mulai mendukung pengembangan *Artificial Intelligence (AI)* di Indonesia dengan cara mengeluarkan inovasi berbasis *Artificial Intelligence (AI)* yang bernama *Artificial Intelligence For Financial Advisor (AIFA)* bagi Pemerintah Daerah.<sup>6</sup>

*Artificial Intelligence (AI)* sangat tepat dalam pembentukan kebijakan di bidang keuangan karena memungkinkan pengguna untuk mengumpulkan, menyusun, dan

---

<sup>5</sup> Sinta Dewi Rosadi, 2022, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 130-131.

<sup>6</sup> Ayuni Putri Anggraeni dan Alih Aji Nugroho, 2022, "Strategi Pengambilan Keputusan Keuangan Berkelanjutan dengan *Artificial Intelligence For Financial Advisor (AIFA)*", Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA), Bandung: Politeknik STIA LAN.

menganalisis data yang lebih akurat dalam skala kecil maupun dalam skala yang besar. Dengan menggunakan algoritma yang kompleks, *Artificial Intelligence (AI)* dapat memprediksi hasil dari kebijakan yang diambil. Penggunaan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembentukan kebijakan dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengambilan kebijakan.

Dengan dibentuknya kebijakan yang berbasis pada *Artificial Intelligence (AI)* pada sektor keuangan di Indonesia, salah satu manfaat yang dapat diperoleh adalah misalnya dalam hal penilaian kelayakan kredit nasabah dalam hal ini untuk menganalisis seberapa besar modal yang dimiliki oleh debitur ataupun dalam menilai laporan keuangan. Sehingga, penilaian-penilaian tersebut tidak membutuhkan proses analisis dalam waktu lama, melainkan dengan diterapkannya kebijakan yang berbasis *Artificial Intelligence (AI)* maka analisis keuangan tersebut dapat dilakukan dengan cepat. Oleh karena itu, pemanfaatan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembentukan kebijakan di bidang keuangan merupakan sebuah inovasi dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas, serta transparansi dalam kebijakan publik khususnya pada bidang keuangan.

## **2. Pembentukan Kebijakan Keuangan Berbasis *Artificial Intelligence***

Penerapan *Artificial Intelligence (AI)* dalam pembentukan kebijakan menjadi semakin relevan seiring perkembangan teknologi. AI memiliki potensi besar untuk memberikan analisis data yang lebih baik, meningkatkan efisiensi,<sup>7</sup> serta memungkinkan prediksi dan simulasi hasil kebijakan yang lebih akurat. Dengan kemampuan menganalisis data dalam jumlah besar dengan cepat, AI membantu pembuat kebijakan membuat keputusan yang lebih akurat dan berbasis bukti. Selain itu, AI dapat mengotomatisasi proses seperti pemodelan prediktif dan analisis dampak kebijakan<sup>8</sup>, sehingga mengurangi faktor *human error*. Kemampuan AI untuk mendeteksi masalah atau tren merugikan lebih dini juga memungkinkan intervensi yang lebih cepat dan tepat.

---

<sup>7</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Muhammadiyah Yusrizal Adi Syahputra, 2020, "Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah", *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 14(3), hlm. 424.

<sup>8</sup> Nabila Fitri Amelis, et al, 2024, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi* 2(1), hlm. 61.

Pengaruh AI dalam pembentukan kebijakan bisa sangat signifikan, dengan dampak luas pada berbagai aspek pembuatan dan pelaksanaan kebijakan. AI dapat mengidentifikasi anomali dan pola pada data yang tidak terlihat oleh manusia,<sup>9</sup> memberikan wawasan yang lebih mendalam dan akurat. Dengan mengotomatisasi tugas-tugas tertentu, AI meningkatkan efisiensi dalam proses pembentukan kebijakan, seperti analisis dampak kebijakan yang biasanya memakan waktu lama dapat dilakukan lebih cepat dan dengan akurasi lebih tinggi, memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya ke area lain yang membutuhkan perhatian manusia.<sup>10</sup> AI juga dapat digunakan untuk memprediksi hasil kebijakan yang diusulkan dan mensimulasikan berbagai skenario, membantu pembuat kebijakan memahami potensi konsekuensi sebelum implementasi, sehingga dapat mengantisipasi masalah dan menyesuaikan kebijakan lebih awal.<sup>11</sup>

Dalam hal pemantauan dan evaluasi<sup>12</sup>, AI dapat memantau pelaksanaan kebijakan secara *real-time* dan mengevaluasi efektivitasnya, memungkinkan identifikasi masalah lebih dini dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan, sehingga kebijakan dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan hasil nyata. Jika diterapkan dengan benar, AI dapat membantu mengurangi bias manusia dalam proses pengambilan keputusan, melalui algoritma yang dirancang baik dan data yang representatif, memastikan kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan tidak bias.

Pembentukan kebijakan keuangan berbasis AI melibatkan penggunaan teknologi AI untuk menganalisis data keuangan, memprediksi tren ekonomi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berbasis bukti. AI dapat mengumpulkan dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk data pasar keuangan, data ekonomi makro, laporan perusahaan, dan data konsumen. Dengan kemampuan analisisnya, AI dapat mengidentifikasi pola dan tren yang tidak mudah dilihat oleh manusia, membantu pembuat kebijakan

---

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 61.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, "Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia", Simbur Cahaya 25(2), hlm. 144.

<sup>12</sup> Brilliantio Mochammad Prakoso, et al, 2024, "Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia", Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2(1), hlm. 229.

memahami kondisi ekonomi dan pasar dengan lebih baik, sehingga dapat membuat keputusan yang lebih tepat.<sup>13</sup>

AI menggunakan teknik *machine learning* dan pemodelan prediktif<sup>14</sup>, untuk meramalkan perkembangan ekonomi masa depan, mencakup prediksi inflasi, pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan fluktuasi pasar. Dengan prediksi yang lebih akurat, pembuat kebijakan dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan ekonomi dan memanfaatkan peluang. Selain itu, AI dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan keuangan yang sudah diterapkan dengan cara menganalisis data hasil implementasi kebijakan tersebut, memungkinkan pembuat kebijakan untuk menyesuaikan strategi mereka berdasarkan hasil nyata, bukan hanya asumsi atau prediksi awal.

Dalam pembentukan kebijakan keuangan, AI dapat memberikan rekomendasi yang didasarkan pada analisis data yang komprehensif dan dilakukan secara *real-time*, membantu mengurangi bias dan subjektivitas dalam pengambilan keputusan dengan memberikan pandangan yang objektif dan berdasarkan data.<sup>15</sup> Misalnya, AI dapat merekomendasikan perubahan kebijakan suku bunga berdasarkan analisis tren ekonomi global dan domestik. AI juga dapat digunakan untuk mendeteksi aktivitas penipuan dalam sistem keuangan dengan menganalisis transaksi dan mengidentifikasi pola yang mencurigakan. Selain itu, AI membantu dalam manajemen risiko dengan mengidentifikasi potensi risiko keuangan dan memberikan solusi mitigasi, penting untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah krisis keuangan.

Dengan menggunakan AI, proses pembentukan kebijakan keuangan dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.<sup>16</sup> Algoritma AI dapat dirancang untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana sebuah keputusan dibuat, sehingga pembuat kebijakan dan publik dapat memahami logika di balik rekomendasi AI, membantu meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan yang dihasilkan. Namun, penggunaan AI dalam pembentukan kebijakan keuangan juga menghadirkan tantangan, termasuk masalah privasi data, keamanan, dan

---

<sup>13</sup> Ayuni Putri Anggraeni dan Alih Aji Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 158.

<sup>14</sup> Putri Dwima Ernis dan Padli Pirdaus, et al, 2022, "Dampak Teknologi Artificial Intelligence Pada Profesi Akuntansi", EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 2(1), hlm. 134.

<sup>15</sup> Septeven Huang dan Aisyah Sharifa, 2012, "Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Pasar Modal Di Indonesia", *International Journal of Information Management* 32(6), hlm. 531.

<sup>16</sup> Ayuni Putri Anggraeni dan Alih Aji Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 157.

potensi bias dalam algoritma. Penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan oleh AI adalah representatif dan bebas dari bias, serta mengembangkan regulasi yang tepat untuk mengatur penggunaan AI dalam keuangan.

Untuk memastikan manfaat maksimal dari AI dalam pembentukan kebijakan keuangan, penting untuk mengembangkan strategi implementasi yang bijak. Ini mencakup pelatihan bagi pembuat kebijakan tentang penggunaan AI, kolaborasi dengan ahli teknologi dan ekonomi, serta penerapan prinsip-prinsip etika dalam pengembangan dan penggunaan AI. Regulasi dan pengawasan yang ketat juga diperlukan untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan transparan. Secara keseluruhan, penerapan AI dalam pembentukan kebijakan keuangan memiliki potensi besar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi keputusan keuangan, namun memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bertanggung jawab untuk mengatasi tantangan dan risiko yang mungkin muncul.

Ada beberapa negara yang telah menggunakan AI dalam pembentukan kebijakan keuangan. Kanada<sup>17</sup> telah menggunakan AI dalam pengelolaan risiko kredit, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengelolaan data. AI juga digunakan dalam pengelolaan defisit anggaran dan pengelolaan inflasi. Finlandia<sup>18</sup> juga telah menggunakan AI dalam pengelolaan risiko kredit, pengawasan dan penegakan hukum, serta pengelolaan data, selain menggunakannya dalam pengelolaan defisit anggaran dan inflasi. Australia, USA, China, Jepang, Korea, Estonia, Israel, dan Italia juga mengimplementasikan AI untuk berbagai tujuan serupa.<sup>19</sup> Negara-negara ini memanfaatkan AI untuk mengelola risiko kredit, melakukan pengawasan dan penegakan hukum, serta mengelola data, termasuk dalam upaya pengelolaan defisit anggaran dan inflasi. Secara keseluruhan, AI telah membantu dalam pembentukan kebijakan keuangan di berbagai negara, meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan nasional mereka.

Kebijakan keuangan berbasis AI ini memiliki dampak yang signifikan pada stabilitas keuangan nasional. Melalui analisis risiko yang lebih akurat, AI membantu lembaga keuangan dan regulator dalam mengidentifikasi potensi risiko ekonomi dan keuangan dengan

---

<sup>17</sup> Virginia Torrie dan Dominique Payette, 2020, "AI Governance in Canadian Banking: Fairness, Credit Models, and Equality Rights", *Credit Models, and Equality Rights* 32, hlm. 25.

<sup>18</sup> Karim Ourderdine, 2019, "General Perception Of Artificial Intelligence And Impacts On The Financial Sector In Finland", Laporan, Haaga-Helia University of Applied Science, hlm. 30-34.

<sup>19</sup> Yuxin Li, 2021, "Theory And Application Of Artificial Intelligence In Financial Industry", *Data Science in Finance and Economics* 1(2)

lebih baik, memungkinkan mereka merancang kebijakan yang lebih tepat untuk mengurangi dampak negatif dari peristiwa-peristiwa tak terduga. Selain itu, AI juga membantu mendeteksi dini tanda-tanda ketidakseimbangan atau ketidakstabilan dalam sistem keuangan, seperti gelembung aset atau kredit, sehingga otoritas keuangan dapat mengambil tindakan pencegahan yang sesuai. Manajemen risiko yang lebih efektif, efisiensi dan transparansi pasar keuangan yang ditingkatkan, serta respons yang lebih cepat terhadap perubahan ekonomi juga menjadi dampak positif lainnya. Meskipun demikian, implementasi kebijakan keuangan berbasis AI juga menimbulkan risiko, seperti privasi data, keamanan sistem, dan potensi bias dalam algoritma AI, sehingga perlu dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan risiko yang terkait secara menyeluruh.

Namun, terdapat tantangan dan risiko yang perlu diperhatikan, seperti bias yang tidak disadari dalam algoritma AI jika data yang digunakan untuk melatihnya bias, hal tersebut dapat mempengaruhi transparansi dalam keputusan yang dihasilkan oleh AI yang dapat menjadi masalah karena sulit bagi manusia untuk memahami dan menjelaskan bagaimana keputusan tersebut dibuat. Permasalahan tersebut juga terkait dengan pertanggungjawaban dalam pembuatan kebijakan tersebut, karena AI sendiri merupakan sebuah sistem komputer. Risiko ketergantungan<sup>20</sup> berlebihan pada AI juga dapat mengurangi peran intuisi dan pengalaman manusia dalam pengambilan keputusan. Untuk memaksimalkan pengaruh positif AI dalam pembentukan kebijakan, penting untuk mengembangkan dan menggunakan AI secara etis dan bertanggung jawab, membekali pembuat kebijakan dengan pengetahuan tentang cara memanfaatkan AI secara efektif, serta mendorong kolaborasi antara berbagai disiplin ilmu untuk memastikan penggunaan AI mempertimbangkan berbagai perspektif dan dampak. Regulasi dan pengawasan yang tepat juga diperlukan untuk memastikan penggunaan AI sesuai dengan standar hukum dan etika. Secara keseluruhan, pengaruh AI dalam pembentukan kebijakan dapat sangat besar jika diterapkan dengan bijak, membantu menciptakan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan adil, dengan tetap mempertimbangkan dan mengatasi tantangan serta risiko yang mungkin muncul.

#### **D. Simpulan**

---

<sup>20</sup> Eka N.A.M. Sihombing dan Muhammadiyah Yusrizal Adi Syahputra, *Op. Cit.* hlm. 422

Penerapan kecerdasan buatan (AI) dalam pembentukan kebijakan menjadi semakin relevan seiring perkembangan teknologi, karena AI dapat memberikan analisis data yang lebih baik, meningkatkan efisiensi, dan memungkinkan prediksi serta simulasi hasil kebijakan yang lebih akurat. AI membantu pembuat kebijakan membuat keputusan berbasis bukti, mengotomatisasi proses tertentu, dan mendeteksi masalah lebih dini. Dalam pembentukan kebijakan keuangan, AI digunakan untuk menganalisis data keuangan, memprediksi tren ekonomi, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif. Selain itu, AI membantu dalam manajemen risiko dan mendeteksi aktivitas penipuan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pengambilan keputusan. Meski penerapan AI dalam pembentukan kebijakan keuangan memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi dibidang keuangan, perlu menyadari bahwa AI adalah sistem yang dirancang berdasarkan algoritma tertentu. Sehingga, proses penciptaan AI ini sejak awal harus diawasi dan diperhatikan supaya tidak menyebabkan bias dalam penilaian. Perlu juga pengarahan kepada pembuat kebijakan mengenai penggunaan AI dan kesadaran bahwa AI adalah sebuah alat yang digunakan untuk membuat kebijakan, bukan pembuat kebijakan. Sehingga Keputusan dan tanggung jawab tetaplah harus didasarkan pada penilaian manusiawi pembuat kebijakan itu sendiri.

### **DAFTAR PUSTAKA**

**a. Buku :**

Jamaluddin dan Indah Sulistyowati, 2021, *Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence)*, Sidoarjo: Umsida Press.

Sinta Dewi Rosadi, 2022, *Cyber Law Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Bandung: PT Refika Aditama.

**b. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Inondoesia Tahun 1945.

**c. Jurnal**

Ayuni Putri Anggraeni dan Alih Aji Nugroho, 2022, "Strategi Pengambilan Keputusan Keuangan Berkelanjutan dengan *Artificial Intelligence For Financial Advisor*

- (AIFA)”, Konferensi Nasional Ilmu Administrasi (KNIA), Bandung: Politeknik STIA LAN.
- Briliantio Mochammad Prakoso, et al, 2024, “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum 2(1).
- Eka N.A.M. Sihombing dan Muhammah Yusrizal Adi Syahputra, 2020, “Implementasi Penggunaan Kecerdasan Buatan Dalam Pembentukan Peraturan Daerah”, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum 14(3).
- Imanuel Adhitya Wulanata Chrismastianto, “Efektivitas Layanan Keuangan Berbasis Machine Learning Sebagai Komponen Pendukung Kebijakan Makroprudensial Pascapandemi Covid-19”, Jurnal Ukrim.
- Karim Ourderdine, 2019, “General Perception Of Artificial Intelligence And Impacts On The Financial Sector In Finland”, Laporan, Haaga-Helia University of Applied Science.
- Nabila Fitri Amelis, et al, 2024, “Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia”, Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi 2(1).
- Paulus Wisnu Yudoprakoso, 2019, “Kecerdasan Buatan Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia”, Simbur Cahaya 25(2)
- Putri Dwima Ernis dan Padli Pirdaus, et al, 2022, “Dampak Teknologi Artificial Intelligence Pada Profesi Akuntansi”, EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi 2(1)
- Septeven Huang dan Aisyah Sharifa, 2012, “Pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan Dalam Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Pasar Modal Di Indonesia”, International Journal of Information Management 32(6).
- Virginia Torrie dan Dominique Payette, 2020, “AI Governance in Canadian Banking: Fairness, Credit Models, and Equality Rights”, Credit Models, and Equality Rights 32.
- Yuxin Li, 2021, “Theory And Application Of Artificial Intelligence In Financial Industry”, Data Science in Finance and Economics 1(2)

**d. Website**

Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, “Bagaimana AI dapat Membantu dalam Pengambilan Keputusan Bisnis yang Lebih Baik”, Lampung: Universitas Teknokrat Indonesia, <https://ftik.teknokrat.ac.id/bagaimana-ai-dapat-membantu-dalam-pengambilan-keputusan-bisnis-yang-lebih-baik/>, diakses Sabtu, 25 Mei 2024..